



**WORKSHOP PENYUSUNAN DATA GENDER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**Nuridin<sup>1\*</sup>, Fatkhuri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
nuridin.fisip@upnvj.ac.id\*

**Article History:**

Received: 04-10-2023

Revised: 12-10-2023

Accepted: 13-10-2023

**Keywords:** Data Gender,  
Kabupaten Tangerang,  
Perencana Program,  
Urusan Pemerintahan

**Abstract:** Penyediaan data gender terpilah berdasarkan jenis kelamin telah menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam mengintegrasikan isu-isu gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender. Workshop penyusunan data gender menjadi salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah daerah Tangerang untuk mengatasi permasalahan ini. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan diskusi kelompok dan praktik disertai penyelesaian masalah. Hasil kegiatan ini memperlihatkan peningkatan sensitifitas dan pola fikir (mindset) para perencana program pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Para perencana program melalui kegiatan ini terbantu dan terfasilitasi dalam menentukan program prioritas daerah yang didasarkan pada data gender untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Kesenjangan (ketidaksiapan) data gender atau data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi permasalahan rumit bagi para pembuat kebijakan pembangunan responsif gender. Kesenjangan ini pada akhirnya akan berdampak pada pemerataan hasil pembangunan yang masih bias gender dan tidak tepat target serta sasaran. Hal ini dikarenakan penganggaran pembangunan tidak didasarkan pada kebutuhan serta pengalaman gender antara laki-laki dan perempuan yang dalam praktiknya berbeda (Buvinic and Levine 2016). Ketersediaan dan penyediaan data gender ini memiliki peran penting bagi para perencana serta pembuat program pembangunan. Data gender ini dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan khususnya terkait akses gender dalam menikmati alokasi sumber daya yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan (Tandon and Pareek 2019) secara umum dan khususnya pada pembangunan di 5 (lima) domain utama yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, partisipasi politik dan keamanan (Buvinic, Myra 2014). Data terpilah berdasarkan jenis kelamin merupakan masukan penting dalam analisis gender dan pemahaman tentang kontribusi ekonomi, situasi dan realitas perempuan dan laki-laki yang berbeda. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan data pilih gender juga akan membantu pemerintah/pemerintah daerah memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang efektif, adil dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki (Neeraja 2016).

Permasalahan penyediaan data gender di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran

program dan kegiatan yang responsif gender. Pemerintah dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering berargumen bahwa ketiadaan data gender dalam urusan pembangunan daerah dikarenakan masih lemahnya kompetensi aparatur sipil negara dalam memahami data gender. Penyediaan data gender yang valid dan akurat tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berupa program pembangunan yang dapat dinikmati oleh laki-laki, perempuan, anak kecil, lansia dan difabel. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dikerjakan sesuai dengan kelompok yang paling membutuhkan serta kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dari proses pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan isu-isu pembangunan selalu dikaitkan dengan ketimpangan gender terhadap kesetaraan dalam menikmati manfaat Pembangunan (Momsen 2009). Dengan demikian, konsekuensi dari permasalahan data gender yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak dinas, badan dan kantor berimplikasi terhadap tidak terukurnya target dan sasaran pembangunan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum dan Kabupaten Tangerang khususnya. Permasalahan ketidaksiapan data gender yang dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ini perlu diselesaikan dengan membuka kerjasama melalui workshop penyusunan data gender di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan data gender atau data terpilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pernah dibahas dalam beberapa penelitian ilmiah. Permasalahan kekurangan data gender yang terpilah menjadi hambatan dalam implementasi penganggaran responsif gender (aprianti, Hesti 2022). Kekurangan data gender terpilah ini dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki mekanisme pengumpulan dan analisis data gender yang terkoordinasi dalam sistem informasi dan data terpilah. Sehingga konsekuensinya adalah dinas/badan/kantor kesulitan dalam melakukan analisis gender dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender (Ilham and Velianto 2022). Dengan demikian, permasalahan kekurangan data pilah gender ini perlu untuk diselesaikan melalui pembuatan sistem yang berbasis data gender dan terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pimpinan tertinggi instansi pemerintah (Syahriza 2021).

Dengan memperhatikan permasalahan kekurangan penguasaan dan penyediaan data gender ini, maka tim menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memerlukan fasilitasi berupa kegiatan workshop penyusunan data gender. Tujuan kegiatan Workshop Penyusunan Data Gender bagi perencana program dan kegiatan dari setiap organisasi perangkat daerah ini adalah untuk memfasilitasi dan membantu dalam penyelesaian permasalahan data gender sebagai bahan perumusan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender. Berdasarkan pada kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, maka data gender yang diperlukan dan dianalisa meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Indonesia 2007).

## **METODE PELAKSANAAN**

Tujuan dari kegiatan *workshop* penyusunan data gender ini adalah memfasilitasi dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat menghasilkan dokumen berupa profil data gender terpilah (*gender segregated data*) sebagai bahan formulasi kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender (PPRG). Sementara sasaran dari kegiatan ini adalah

para perencana program dari dinas, badan dan kantor yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Metode pelaksanaan *workshop* adalah dengan pendekatan diskusi kelompok praktik dan praktik disertai penyelesaian masalah (*problem solving*) dalam penyusunan data gender terpilah. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran di *worksop* ini berupa *flipchart*, metaplan, dan spidol. Peserta dituntun secara sistematis untuk menganalisa data gender yang terkait dan sesuai dengan permasalahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Setiap peserta dari dinas, badan dan kantor dimotivasi untuk dapat menghasilkan data gender untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang responsif gender. Hasil (*output*) dari kegiatan ini adalah berupa *draft* (rancangan) data gender terpilah sebagai bahan awal bagi dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahapan Pelaksanaan *Workshop* Penyusunan Data Gender

Pelaksanaan *workshop* ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Juni 2023 di Ruang Aula Berlian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Adapun tahapan *workshop* ini dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan *output* yang terukur dan efisien. Tabel 1 di bawah akan menjelaskan secara ringkas tahapan pelaksanaan *workshop* penyusunan data gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

**Tabel 1.** Tahapan *Workshop* Penyusunan Data Gender

Tahapan	Kegiatan	Media	Waktu
Pengantar	Penjelasan rencana sesi pembelajaran terkait dengan jenis dan kegunaan data gender sebagai bahan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Setelah itu ada penjelasan tujuan yang direncanakan dapat dicapai dari proses pembelajaran ini.	PPT-01	15 menit
Penjelasan/Paran Presentasi	Penjelasan terkait dengan jenis dan kegunaannya data gender sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.	PPT-02 Whiteboard Flipchart	30 menit
Presentasi hasil diskusi kelompok	Presentasi kelompok diskusi kelompok terbagi dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan jenis dan data gender setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan durasi selama 5 menit.	PPT-03 Whiteboard Flipchart	60 menit
Praktik Data Gender	Setiap kelompok mengerjakan dan mempraktikkan data gender sesuai dengan urusan pemerintahan sebagai hasil dari kegiatan <i>workshop</i> penyusunan data gender.	File Data Gender	120 menit
Pengumpulan Data Gender	Setiap dinas, badan dan kantor mengumpulkan hasil tugas penyusunan data gender sesuai dengan urusan pemerintahan.	Data Gender	15 menit

Kesimpulan	Analisis terkait dengan hasil workshop berupa data gender dari dinas, badan dan kantor.	Data Gender	60 menit
Total waktu	Waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil workshop	Data Gender	300 menit

### Materi *Workshop* Penyusunan Data Gender

Materi workshop merupakan penjelasan terkait dengan konsep penyusunan data gender yang efisien dan benar. Materi-materi yang diberikan dan dijelaskan terdiri dari beberapa tema/topik relevan. Penjelasan materi ini ditujukan untuk membantu perencana program dan kegiatan baik di Dinas, Badan dan Kantor untuk memahami secara umum terkait dengan data gender (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 2 di bawah).

**Tabel 2.** Materi *Workshop* Penyusunan Data Gender

Materi	Ringkasan	Manfaat
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak	Peraturan ini menjadi dasar dan landasan hukum bagi dinas, badan dan kantor dalam melakukan penyusunan data gender sebagai bahan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender.	Peserta (dinas, badan, dan kantor) mendapatkan pemahaman mendalam terkait jenis dan data gender di setiap urusan pemerintahan.
Data Gender (Data Terpilah)	Paparan data gender yang meliputi: 1. Pengertian data gender (data terpilah laki-laki dan Perempuan) 2. Sumber data gender 3. Klasifikasi data gender menurut urusan pemerintahan	Peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait dengan data gender berdasarkan urusan pemerintahan.
Data Gender, Perencanaan dan Penganggaran	Manfaat data gender dalam proses perencanaan dan penganggaran responsive gender.	Peserta dapat menganalisis permasalahan gender dalam pembangunan ( <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statement</i> ).

### Diskusi Kelompok Penyusunan Data Gender

Pelaksanaan diskusi kelompok dimaksudkan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peserta terhadap konsep dan teori data gender yang telah dipresentasikan oleh fasilitator/narasumber. Diskusi kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas data gender yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran Pembangunan responsif gender (penjelasan lebih rinci dapat dibaca pada tabel 3 dibawah).

**Tabel 3.** Diskusi Kelompok *Workshop* Penyusunan Data Gender

Kelompok	Urusan Pemerintahan	Data Gender
Kelompok 1	1. Pendidikan dan Kebudayaan	1. .... 2. ....

	2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3. .... 4. .... 5. ....
Kelompok 2	1. Sosial 2. Tenaga Kerja/Ketenagakerjaan 3. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 4. Ketahanan Pangan 5. Lingkungan Hidup	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
Kelompok 3	1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
Kelompok 4	1. Penanaman Modal 2. Kepemudaan dan Olah Raga 3. Perpustakaan dan Kearsipan 4. Kelautan dan Perikanan 5. Pariwisata	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
Kelompok 5	1. Pertanian, Kehutanan dan Transmigrasi 2. Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 4. Keuangan 5. Penunjang Pemerintahan Daerah (sekretariat daerah)	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

### Hasil Diskusi Kelompok Penyusunan Data Gender

Diskusi kelompok menghasilkan beberapa isu dan permasalahan data gender yang diperlukan oleh dinas, badan dan kantor dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Adapun data gender yang telah diverifikasi sejumlah 28 (dua puluh delapan) urusan dan melekat dengan kewenangan yang dimiliki oleh dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintahan daerah.

## 1. Pendidikan

Data gender di bidang pendidikan meliputi perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu; peningkatan mutu dan relevansi lembaga pendidikan; dan tata kelola dan akuntabilitas yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu yaitu:
  - 1) Tingkat pendidikan yang dicapai penduduk
  - 2) Melek aksara
  - 3) APS anak usia sekolah
  - 4) Partisipasi di jenjang pendidikan SD (APS, APM, APK)
  - 5) Partisipasi di jenjang pendidikan SMP (APS, APM, APK)
  - 6) Partisipasi di jenjang pendidikan SM/SMK (APS, APM, APK)
  - 7) Partisipasi di jenjang pendidikan perguruan tinggi
  - 8) Status sekolah
  - 9) Partisipasi sekolah luar biasa
  - 10) Pendidikan luar sekolah
- b. Peningkatan mutu dan relevansi lembaga Pendidikan yaitu:
  - 1) Angka putus sekolah
  - 2) Angka bertahan
  - 3) Angka kelulusan
  - 4) Angka melanjutkan
  - 5) Angka mengulang
  - 6) Nilai ujian nasional
  - 7) Informasi tentang kurikulum dan pembelajaran
  - 8) Penjurusan dan beasiswa
- c. Tata kelola dan akuntabilitas meliputi:
  - 1) Pengelolaan pendidikan
  - 2) Jumlah guru/kepala sekolah
  - 3) SDM di SKPD menurut berbagai ciri, antara lain, jenis kelamin, eselon, golongan, status, latar belakang pendidikan
  - 4) Stereotipi gender dalam pendidikan (penjurusan, alat olah raga, kegiatan ekstra kurikulum, dan sebagainya).

## 2. Kesehatan

Data gender di bidang kesehatan meliputi permasalahan terkait dengan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan dan Isu gender melekat pada kondisi medis penduduk laki-laki dan perempuan.

- a. Akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
  - 1) Perilaku kesehatan (seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, pemeriksaan kesehatan, penolong persalinan, dan aktivitas berolah raga)
  - 2) Derajat kesehatan (seperti morbiditas, KLB, AKI, AKB, status gizi ibu hamil dan balita, dan BBLR)
  - 3) Upaya kesehatan (seperti pemeriksaan kehamilan/K4, Ponek, Poned, imunisasi, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan dan sosialisasi)
  - 4) Sumber daya kesehatan (seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan)
- b. Isu gender melekat pada kondisi medis penduduk laki-laki dan perempuan meliputi:
  - 1) Prevalensi (meratanya) dan tingkat keparahan penyakit

- 2) Lingkungan fisik dan penyakit
  - 3) Faktor risiko penyakit
  - 4) Persepsi dan respon terhadap penyakit
  - 5) Akses secara fisik, psikologis dan sosial terhadap sarana pelayanan kesehatan
  - 6) Kerentanan terhadap penyakit
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Data gender yang menjadi urusan dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:
- a. Jabatan struktural dan fungsional laki-laki dan Perempuan
  - b. Jumlah pekerja konstruksi laki-laki dan perempuan
  - c. Jumlah sertifikasi tenaga konstruksi laki-laki dan perempuan, dan jumlah pengguna infrastruktur (jalan dan jembatan umum) laki-laki dan perempuan.
  - d. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan
  - e. Jumlah ruang laktasi di gedung/bangunan pemerintah dan publik
  - f. Jumlah tempat penitipan anak di gedung/kantor/kampus dan lain-lain
  - g. Jumlah ruang dan sarana publik yang responsif gender (perempuan, anak-anak, lansia dan difabel)
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Jabatan Struktural dan Fungsional Laki-laki dan Perempuan di K/L/OPD
  - b. Jumlah/persentase pengguna penerangan jalan, kawasan perumahan bebas banjir, desain bangunan yang aman, dan desain trotoar yang bebas halangan bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak, lansia dan difabel.
  - c. Jumlah penyediaan rumah bagi kelompok tertentu (miskin, lansia, tuna wisma dan lain-lain)
  - d. Jumlah pengkses SDA (air bersih, lahan, dan sanitasi)
  - e. Jumlah/persentase kegiatan pengelolaan air limbah rumah tangga ramah lingkungan
  - f. Jumlah/persentase penerima bantuan penanganan rumah tidak layak huni
  - g. Jumlah/persentase perumahan dan kawasan permukiman di desa/kelurahan yang responsif gender
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang menangani bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/OPD Pemadam Kebakaran/Satpol PP
  - b. Persentase laki-laki dan perempuan aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
  - c. Cakupan rasio petugas laki-laki dan perempuan perlindungan masyarakat (Linmas)
  - d. Cakupan rasio patroli siaga laki-laki dan perempuan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Masyarakat
  - e. Jumlah aparaturnya laki-laki dan perempuan yang mengikuti diklat/bimtek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - f. Jumlah anggota legislatif/DPRD kabupaten yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
  - g. Jumlah/persentase konflik yang berlatarbelakang isu SARA
  - h. Jumlah partisipasi politik masyarakat laki-laki dan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum dan kepala daerah

6. Sosial
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
  - b. Jumlah keluarga pra keluarga sejahtera
  - c. Jumlah keluarga sejahtera I s.d. III
  - d. Data legalitas keluarga
  - e. Data ketahanan fisik keluarga
  - f. Data ketahanan ekonomi keluarga
  - g. Data ketahanan sosial psikologi keluarga
  - h. Data ketahanan sosial bidang keluarga
  - i. Jumlah lansia terlantar di luar panti laki-laki dan perempuan
  - j. Jumlah anak terlantar di luar panti laki-laki dan perempuan
  - k. Jumlah penyandang disabilitas terlantar laki-laki dan perempuan
  - l. Jumlah relawan sosial laki-laki dan perempuan
  - m. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) laki-laki dan perempuan
  - n. Jumlah gelandangan dan pengemis laki-laki dan perempuan
7. Tenaga Kerja/Ketenagakerjaan
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
  - b. Data perbedaan upah laki-laki perempuan
  - c. Data tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki perempuan
  - d. Data pekerja informal laki-laki perempuan
  - e. Data pekerja migrant laki-laki perempuan
  - f. Data pekerja rumah tangga laki-laki perempuan
  - g. Data peserta laki-laki perempuan yang mengikuti program padat karya, peserta program teknologi tepat guna (TTG)
  - h. Data pencari kerja laki-laki perempuan
  - i. Data peserta laki-laki perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
  - b. Jumlah organisasi perempuan
  - c. Jumlah kelompok perempuan termarginalkan secara ekonomi dan politik
  - d. Jumlah perempuan di organisasi partai politik/pengurus partai politik
  - e. Jumlah perempuan/kelompok perempuan pelaku industri rumahan
  - f. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
  - g. Data korban perdagangan orang
  - h. Data penanganan hukum
  - i. Data pelayanan korban perdagangan orang
  - j. Data daerah pengirim, transit, dan tujuan
  - k. Data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak
  - l. Data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
  - m. Data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih
  - n. Data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak
  - o. Data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa)
  - p. Data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
  - q. Data anak jalanan

- r. Data anak yang terisolasi
9. Ketahanan Pangan
    - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional di K/L/OPD baik laki-laki dan perempuan
    - b. Jumlah penduduk miskin rawan pangan
    - c. Jumlah keluarga miskin rawan pangan
    - d. Jumlah penguasaan lahan pertanian oleh perempuan dan laki-laki
    - e. Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pengembangan pangan
    - f. Data terpilah daerah rawan pangan
  10. Pertanian
    - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
    - b. Jumlah kepemilikan tanah oleh laki-laki dan perempuan
    - c. Jumlah kepemilikan properti oleh laki-laki dan perempuan
  11. Lingkungan Hidup
    - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional di K/L/OPD baik laki-laki dan perempuan
    - b. Data sampah rumah tangga
    - c. Data sampah hasil usaha oleh perusahaan/pelaku usaha
    - d. Data terpilah dampak pencemaran lingkungan
    - e. Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang responsif gender
    - f. Jumlah peserta pelatihan pencegahan dampak pencemaran lingkungan
    - g. Jumlah petugas kebersihan dan pengelola sampah laki-laki dan perempuan
    - h. Jumlah pengelola dan petugas konservasi sumber daya alam
  12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
    - b. Jumlah aparatur/peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
    - c. Jumlah akta kelahiran laki-laki dan perempuan yang diterbitkan
    - d. Jumlah bayi laki-laki dan perempuan yang mendapatkan akte kelahiran
    - e. Jumlah akte kematian laki-laki dan perempuan yang diterbitkan
    - f. Jumlah akte perkawinan yang diterbitkan
    - g. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki kartu tanda penduduk
    - h. Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang memiliki kartu identitas anak
    - i. Jumlah pemanfaatan data kependudukan oleh laki-laki dan perempuan
  13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional di kantor desa baik laki-laki dan Perempuan
    - b. Jumlah peserta/aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
    - c. Jumlah pelaku usaha perekonomian/wirausaha kreatif laki-laki dan perempuan di tiap desa
    - d. Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat partisipatif yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan
    - e. Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi dan keterampilan yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan desa
    - f. Jumlah pengurus laki-laki dan perempuan dalam struktur lembaga kemasyarakatan desa
    - g. Jumlah masyarakat desa baik laki-laki dan perempuan yang difasilitasi

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Jumlah peserta KB aktif laki-laki dan Perempuan
  - c. Jumlah pasangan usia subur
  - d. Jumlah kelompok ketahanan keluarga
  - e. Jumlah penduduk yang datang/penduduk pindah dan penduduk yang keluar laki-laki dan Perempuan
  - f. Data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
15. Perhubungan
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Jumlah/angka/tingkat/persentase kecelakaan laki-laki dan Perempuan
  - c. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang responsif gender
  - d. Kasus keselamatan (laki-laki dan perempuan)
  - e. Kasus pelecehan seksual di transportasi umum
  - f. Data keterjangkauan terhadap transportasi umum
  - g. Data akses terhadap kebutuhan khusus perempuan
  - h. Data peserta didik sekolah tinggi pelayaran, penerbangan, transportasi darat (laki-laki dan perempuan)
  - i. Data sarana dan prasarana transportasi yang responsif gender
  - j. Data peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan
16. Komunikasi dan Informatika
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Isu gender dalam iptek
  - c. Data pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika yang responsif gender di OPD dan Masyarakat
  - d. Jumlah aplikasi dan akses terhadap teknologi yang ramah gender
  - e. Jumlah tenaga yang memiliki sertifikasi/kompetensi bidang komunikasi dan informatika laki-laki dan perempuan
  - f. Jumlah melek TIK (laki-laki dan perempuan)
  - g. Jumlah pengguna TIK (laki-laki dan perempuan)
  - h. Jumlah peserta/aparatur sipil negara yang mengikuti diklat penjenjangan dan pendidikan dan pelatihan teknis bidang komunikasi dan informatika (laki-laki dan perempuan)
  - i. Jumlah/cakupan pengguna layanan pengadaan barang dan jasa elektronik laki-laki dan Perempuan
17. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
  - b. Jumlah peserta/aparatur sipil negara yang mengikuti diklat penjenjangan dan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (laki-laki dan perempuan)
  - c. Jumlah peserta fasilitasi promosi dan kemitraan baik laki-laki dan Perempuan
  - d. Jumlah peserta pelatihan/workshop manajemen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan
  - e. Data terpilah (laki-laki dan perempuan) pengurus dan keanggotaan koperasi, pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
  - f. Data terpilah (laki-laki dan perempuan) penerima bantuan/pinjaman dana bergulir melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB)

- g. Data terpilah (laki-laki dan perempuan) peserta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
18. Penanaman Modal
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah calon investor dan investor baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah pengurus/direksi perusahaan penanaman modal baik laki-laki dan Perempuan
19. Kepemudaan dan Olah Raga
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah/persentase pemuda berprestasi non akademik yang mendapatkan penghargaan baik laki-laki dan Perempuan
  - Data terpilah bidang kepemudaan (organisasi dan aktifitas)
  - Data terpilah bidang keolahragaan (cabang olahraga)
  - Jumlah atlet berprestasi yang mendapatkan penghargaan baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang responsif gender
  - Jumlah kebijakan manajemen olahraga yang responsif gender
20. Kebudayaan
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah peserta/ASN yang mengikuti diklat/bimtek bidang kebudayaan baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah budaya benda dan budaya tak benda
  - Jumlah pengunjung ke lokasi budaya benda baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah pengelola kebudayaan baik laki-laki dan Perempuan
21. Perpustakaan
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah peserta/ASN yang mengikuti diklat/bimtek bidang perpustakaan baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah koleksi bahan bacaan yang responsif gender
  - Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang responsif gender
  - Jumlah lembaga kerjasama perpustakaan yang responsif gender
  - Data terpilah pengunjung/pengguna perpustakaan baik laki-laki dan Perempuan
22. Kearsipan
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Jumlah peserta/ASN yang mengikuti diklat/bimtek bidang kearsipan baik laki-laki dan Perempuan
  - Data terpilah pengguna informasi kearsipan (elektronik dan media lain) baik laki-laki dan Perempuan
23. Kelautan dan Perikanan
- Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - Data terpilah pengembangan pengelolaan usaha nelayan perempuan dan laki-laki
  - Data terpilah pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan perempuan dan laki-laki
  - Data terpilah akses perempuan nelayan terhadap pemodal/kredit
  - Data terpilah akses perempuan nelayan terhadap penyuluhan dan keterampilan
  - Data terpilah peserta pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti aparat sipil negara
  - Jumlah pelaku usaha budidaya ikan laki-laki dan Perempuan

24. Pariwisata
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Jumlah pelaku usaha pariwisata laki-laki dan Perempuan
  - c. Data destinasi pariwisata yang responsive gender
  - d. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bidang pariwisata yang diikuti oleh laki-laki dan Perempuan
25. Pertanian
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Data kepemilikan lahan pertanian oleh laki-laki dan Perempuan
  - c. Data penerima bantuan modal pertanian laki-laki dan Perempuan
  - d. Data pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian laki-laki dan perempuan
  - e. Data terpilah (laki-laki dan perempuan) tenaga kerja sector pertanian
  - f. Data terpilah akses petani laki-laki dan perempuan atas informasi pertanian
  - g. Data terpilah penyuluh pertanian/peternakan
  - h. Data terpilah peternak/usaha bidang peternakan
26. Kehutanan
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Peran perempuan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan menopang kebutuhan energi rumah tangga
  - c. Data kerentanan masyarakat (laki-laki, perempuan, dan anak) terhadap dampak perubahan iklim
  - d. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan sektor kehutanan, akses terhadap sumber daya kehutanan
27. Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Jumlah pengelola pergudangan, energi dan sumber daya mineral
  - c. Jumlah petugas metrologi laki-laki dan Perempuan
  - d. Jumlah peserta diklat/bimbingan teknis bidang energi dan sumber daya mineral yang diikuti laki-laki dan Perempuan
28. Perdagangan
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan Perempuan
  - b. Data terpilah pelaku usaha perdagangan dalam negeri
  - c. Data terpilah pelaku usaha perdagangan luar negeri
  - d. Data terpilah petugas lapangan perdagangan
  - e. Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bidang perdagangan
29. Perindustrian
  - a. Jumlah jabatan struktural dan fungsional baik laki-laki dan perempuan
  - b. Jumlah peserta laki-laki dan perempuan program beasiswa tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah
  - c. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bidang perindustrian

### **Praktik Pemanfaatan Data Gender dalam Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah**

Praktik pemanfaatan data gender sebagai bahan perumusan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender. Pada tahapan ini peserta dijelaskan bahwa perencanaan merupakan tolok ukur seberapa dalam isu-isu gender telah terintegrasikan dalam program pembangunan (Moser 1993). Peserta dilatih untuk dapat

mengintegrasikan data gender dengan menggunakan analisis gender melalui dua tahapan yaitu GAP dan GBS. Peserta dilatih untuk mengisi format GAP dan GBS dengan menggunakan data gender yang telah disiapkan. Untuk melakukan analisis pembangunan yang responsive gender dalam suatu program dan kegiatan, peserta yang merupakan perencana program dan kegiatan harus menyelesaikan 3 (tiga) tahapan yaitu data gender, GAP dan GBS (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 4 di bawah).

**Tabel 4.** Pemanfaatan Data Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Data Gender/Terpilah	GAP	GBS
1. Jenis kelamin- dipilah menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan (belum ada isu gendernya)	1. Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, output kegiatan
2. Kualitatif–tidak terukur, bentuknya dalam kata-kata (data kualitatif yang memuat isu gender, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat)	2. Data pembuka wawasan (kualitatif dan kuantitatif)	Analisis situasi (memanfaatkan data kualitatif, kuantitatif dan menurut jenis kelamin)
3. Kuantitatif – data yang terukur) bentuknya dalam angka/jumlah	3. Faktor kesenjangan (data kualitatif dan kuantitatif)	Capaian program
	4. Sebab kesenjangan internal (data kualitatif)	Rencana aksi (Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
	5. Sebab kesenjangan eksternal (data kualitatif)	Capaian program (memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif)
	6. Reformulasi tujuan	Capaian program (data terpilah kualitatif dan kuantitatif dan jenis kelamin)
	7. Rencana aksi	
	8. Data dasar (baseline) (kualitatif dan kuantitatif)	
	9. Indikator Gender/Kinerja (data kualitatif dan kuantitatif)	

Tabel 4 di atas menjelaskan tahapan pemanfaatan data gender sebagai bahan kebijakan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pada tahapan pertama adalah dinas harus memiliki data gender (data terpilah antara laki-laki dan perempuan). Analisis data gender/data terpilah yang telah terkumpul kemudian oleh perencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria utama yaitu data gender umum, data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender oleh perencana program dianalisis kembali menjadi data kualitatif dan kuantitatif yang sudah berisi permasalahan/isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah.

Pada tahapan kedua perencana program menginput dan mengintegrasikan data gender yang telah dianalisis kedalam format *Gender Analysis Pathway* (tahapan analisis gender) sesuai urusan pemerintahan (Dinas/Badan/Kantor). Data gender ini kemudian diintegrasikan dalam penyusunan GAP OPD khususnya dalam menjelaskan poin data

pembuka wawasan, faktor dan sebab kesenjangan baik internal dan eksternal, data baseline dan indicator gender. Pada tahapan ini perencana telah mengintegrasikan perencanaan program dan kegiatan OPD dengan isu/permasalahan gender sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (untuk lebih jelas dapat dilihat pada kolom GAP pada tabel 4 di atas).

Tahapan terakhir yang perlu dilakukan oleh perencana program adalah mengintegrasikan data gender kedalam GBS (*gender budget statement*). Pada tahapan ini data gender baik kuantitatif maupun kualitatif dimanfaatkan untuk menganalisa situasi kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui *impact* (dampak) dari pelaksanaan program yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tangerang. Capaian program kegiatan yang akan dilaksanakan diukur berdasarkan kuantitas output dan presentasi (%) yang dapat memperbaiki kesenjangan gender dalam pembangunan daerah.



**Gambar 1.** *Workshop* Penyusunan Data Gender Kabupaten Tangerang 2023

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan *workshop* ini tentunya memiliki arti penting dan berimplikasi terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta dalam menyelesaikan permasalahan penyediaan data gender. Peningkatan wawasan peserta berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan data gender sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Sementara peningkatan pengetahuan berupa keterampilan teknis peserta dalam penggunaan metode pengumpulan dan analisis data gender serta penyediaan data gender sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Selain itu peserta *workshop* juga terbantu dan terfasilitasi dalam memanfaatkan data gender untuk melakukan analisis gender dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Tangerang. Hasil pelaksanaan *workshop* ini juga memperlihatkan perilaku yang lebih sensitif gender terhadap para perencana program dan kegiatan. Tentunya hasil ini akan mendorong perubahan (*transformation*) pola pikir (*mindset*) para aparatur sipil negara (ASN) dalam memandang dan memahami gender tidak hanya kegiatan-kegiatan yang selalu melibatkan perempuan saja sebaliknya program pembangunan yang responsif gender hampir tersebar di seluruh badan/dinas/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam rangka penguatan kapasitas para perencana program dan kegiatan pada Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka sangat disarankan untuk merencanakan kegiatan lanjutan terkait pelatihan analisis gender.

Pelatihan analisis gender bagi para perencana program ini akan membantu dalam mempermudah penyusunan format *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*. Penguasaan penyusunan kedua dokumen ini akan memberikan manfaat besar bagi para perencana program terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang responsif gender lebih baik dan komprehensif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memberi dukungan materi dan non materi khususnya kesempatan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Tim juga mengapresiasi dukungan panitia kegiatan workshop ini khususnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang telah menjalin Kerjasama yang baik dalam mengelola data gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aprianti, Hesti, et al. 2022. "Anggaran Responsif Gender: Menimalisir Disparitas Partisipasi Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4(2): 171–82. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa>.
- [2] Buvinic, Myra, et al. 2014. "Mapping Gender Data Gaps." *Data2X report, United Nations Foundation, Washington, DC*. [http://data2x.org/wp-content/uploads/2014/11/Data2X\\_MappingGenderDataGaps\\_FullReport.pdf](http://data2x.org/wp-content/uploads/2014/11/Data2X_MappingGenderDataGaps_FullReport.pdf) (March).
- [3] Buvinic, Mayra, and Ruth Levine. 2016. "Closing the Gender Data Gap." *Significance* 13(2): 34–37.
- [4] Ilham, Teguh, and Adam Udi Velianto. 2022. "Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48(1): 127–40.
- [5] Momsen, Janet. 2009. *Gender and Development, Second Edition*. London & New York: Routledge.
- [6] Moser, C. O.N. 1993. *Gender planning and development: theory, practice and training*. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*.
- [7] Neeraja, P. 2016. "Sex Segregated Data in Addressing Women 's Issues." *International Journal of Research in Social Sciences* 6(12): 199–208. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijrss&volume=6&issue=12&article=015>.
- [8] Pemerintah Indonesia. 2007. Sekretariat Negara *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- [9] Syahriza, Rahmi. 2021. "Sistem Data Terintegrasi Terinterkoneksi Untuk Data Pilah Gender Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1(2): 86.
- [10] Tandon, Ambika, and Vedika Pareek. 2019. "Gender Data Gap." *The Centre for Internet and Society*: 1–13.